



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat Nya serta kerja keras jajaran BPK Perwakilan provinsi Sumatera Utara, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat tersusun. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPK dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK sesuai dengan alokasi dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan BPK untuk Tahun 2021. Laporan ini merupakan laporan tahun kedua pada periode Renstra 2020-2024.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK telah menetapkan visi dalam Renstra BPK 2020-2024 yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara”. Dalam upaya untuk mencapai visi tersebut BPK mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk itu BPK telah menetapkan tiga misi yaitu: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

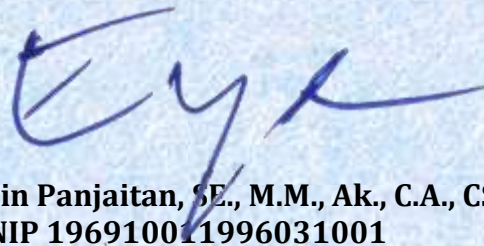
Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang-undang Dasar mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 belum

seungguhnya dapat mencapai seluruh target IKU. Untuk itu, segenap jajaran pejabat struktural dan staf di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen untuk senantiasa berbenah diri dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Semoga LAK Tahun 2021 dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Medan, Januari 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, SE., M.M., Ak., C.A., CSFA.
NIP 196910011996031001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1
3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.	4
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	8
1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara...	8
2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	13
A Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2021.....	13
B Rincian Skor masing masing IKU.....	13
C Penjelasan Capaian IKU.....	14
1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	14
2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	15

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	15
4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik NAsional	17
5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.....	18
6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	18
7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	19
8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	20
9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	20
10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	21
11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	23
12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	23
13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.....	24
D Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra.....	29
E Rencana Aksi Untuk Memerbaiki Kinerja di Masa Mendatang	31
BAB IV PENUTUP	32

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 3.1	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, Target IKU dan Capaian IKU Tahun 2021.....	13
Tabel 3.2	Komponen IKU 1	14
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	15
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	16
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	16
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian IK 4 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	17
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian IK 5 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	18
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian IK 6 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	19
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian IK 7 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	20
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian IK 8 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	20
Tabel 3.11	Rincian Nilai IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	21
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian IK 9 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	21
Tabel 3.13	Rincian Perolehan Nilai IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	22
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian IK 10 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	22

Tabel 3.15	Perbandingan Capaian IK 11 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	23
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian IK 12 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	24
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian IK 13 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020.....	24
Tabel 3.18	Rincian Nilai Komponen EKA di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	25
Tabel 3.19	Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra 2020-2024	30

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Visualisasai Renstra BPK 2020-2024	7
Gambar 2.2	Visualisasai Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.....	9
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	12

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN V membawahi dua Auditorat, satu sekretariat AKN dan 16 Perwakilan Wilayah Barat, satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V yang terdiri dari:

Subauditorat Sumatera Utara I;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera I BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Ramzuhri.

Subauditorat Sumatera Utara II;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Myrto Handayani.

Subauditorat Sumatera Utara III;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Pada saat ini Kepala Subauditorat Sumatera III BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Syafruddin Lubis.

Sekretariat Perwakilan;

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
2. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan prasarana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
5. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara; dan
7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
8. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.

Pada saat ini Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah Rekson Pangaribuan.

4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Per 31 Desember 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki 177 personil, meliputi 10 personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 61 Personil di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan) dan 106 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp39.707.120.000,00 sesuai dengan RKAKL TA

2021, direvisi menjadi Rp38.726.868.000,00 dan terealisasi s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp38.143.996.877,00.

Bab II

Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.1: Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Sebagai unit kerja pemeriksaan dalam naungan Auditorat Keuangan Negara V, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sangat mendukung strategi meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 2 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas;
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan.

Berikut merupakan visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.



Gambar 2.2: Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara selaku pihak pertama, Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) selaku pihak kedua, dan diketahui oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota V BPK RI.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Akhsanul Khaq, MBA., CMA, CFE, CA, Ak., CSFA, CPA, CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,



Dr. Akhsanul Khaq, MBA., CMA, CFE, CA, Ak., CSFA, CPA, CFrA.

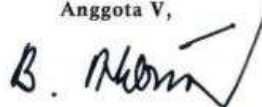
Pihak Pertama,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

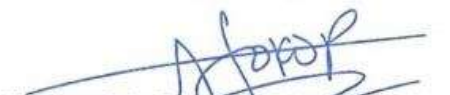
Diketahui oleh:

Anggota V,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.

Wakil Ketua,



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.

Ketua,



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.

INDIKATOR RINCIAN OUTPUT DAN TARGET TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%	
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas Nama BPK	100%	
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	
		LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%	
		Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	
		Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
			Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
				Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1 Paket	
	Layanan Prasarana Internal		Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	
	Layanan Perkantoran		Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	
		Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%		

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (Rincian Output)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST, POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua,



**Dr. Akhsanul Khaq, MBA., CMA, CFE, CA,
Ak.. CSFA. CPA. CFrA.**

Pihak Pertama,



**Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M.,
Ak.. CA.. CSFA.**

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara

A. Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2021

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 memperoleh skor pencapaian kinerja 99,94. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan skor 96,96.

B. Rincian Skor masing-masing IKU

Berikut adalah target dan realisasi pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

**Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama,
Target IKU dan Capaian IKU Tahun 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Realisasi 2021	Skor
1	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Anggaran awal sebesar Rp39.707.120.000,00 dan direvisi sebesar Rp38.726.868.000,00	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,71%	83,71
2			IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
3			IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,94%	105
4			IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,27%	100,27
5			IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,05%	100,05
6			IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,69%	100,69
7			IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (4,50)	90
8			IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	A (87,67)	100,77

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target 2021	Realisasi 2021	Skor
9			IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,14%	102,23
10			IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	118,75%	105
11			IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,95)	103,95
12			IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
13			IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,50%	91,04%	104,05

C. Penjelasan Capaian IKU

Pencapaian target IKU Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama, Target IKU dan Capaian IKU dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan. Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal satker melalui QA dan QC dan eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Adapun bobot untuk penilaian QA dan QC sebesar 40%, hasil evaluasi EPP sebesar 50%, dan hasil reviu itama sebesar 10%.

Pada Tahun 2021, pencapaian IKU ini mencapai 77,94%. Nilai ini diperoleh dengan komponen sebagai berikut.

Tabel 3.2 Komponen IKU 1

No	Komponen IKU 1	Nilai	Bobot	skor
1	QA dan QC	100	40%	40,00%
2	Evaluasi EPP	67,43	50%	33,72%
3	Reviu Itama	100	10%	10,00%
	Jumlah			83,71%

Nilai QA dan QC berdasarkan pengisian lembar reviu oleh kepala perwakilan dan kepala subauditorat selaku PSP, dan pengendali mutu (penanggungjawab), pengendali teknis dan ketua tim selaku PFP. Pada lembar reviu tersebut telah dilakukan pengisian lembar reviu seluruhnya, sehingga nilai komponen IKU ini 100.

Penilaian evaluasi EPP berdasarkan evaluasi atas akurasi dan konsistensi LHP LKPD TA 2020 dan LHP LFAR Tahun 2021. Sedangkan evaluasi atas revidu itama belum dilakukan pengukuran pada Tahun 2021, namun nilai komponen IKU ini tetap dianggap 100.

Target IKU 1 pada Tahun 2021 adalah 100%, dan terealisasi sebesar 83,71% atau lebih kecil dari target. Sehingga skor untuk IKU 1 adalah 83,71. Ketidaktercapaian IKU ini dikarenakan penilaian evaluasi LHP oleh EPP tidak mencapai 100% yang disebabkan adanya koreksi akurasi dan konsistensi LHP LKPD sebagaimana table diatas. Hal ini akan menjadi perhatian perwakilan untuk meningkatkan kualitas LHP pada pemeriksaan kedepannya, diantaranya dengan melakukan *cross revidu* konsep LHP.

Untuk mencapai IKU 1 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengalanggarakan anggaran sebesar Rp4.389.297.000,00, dan terealisasi sebesar Rp4.352.257.063,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp37.039.937,00 atau 0,85%.

Tabel 3.3 - Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,71	77,94%	N/A

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Dengan adanya IKU ini diharapkan satker pemeriksaan untuk terus meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan.

Pada Tahun 2021, berdasarkan laporan evaluasi EPP, pencapaian IKU ini sebesar 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga skor IKU 2 adalah 100.

Tercapainya IKU 2 ini tidak lepas dari peran para pemeriksa di Perwakilan Sumatera Utara yang senantiasa memfokuskan pemeriksaan sesuai dengan P2 sehingga simpulan yang diperoleh sesuai dengan P2 yang direncanakan.

Untuk mencapai IKU 2 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp7.244.244.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.066.249.296,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp177.994.704,00 atau 2,52%.

Tabel 3.4 - Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	N/A

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Sehingga dengan pengukuran IKU ini diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara/daerah.

Pada Tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 78,94% atau lebih besar dari target sebesar 75%. Sehingga skor IKU 3 adalah 105. Ketercapaian IKU ini tidak lepas dari peran Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dalam memotivasi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk lebih maksimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta kerja keras pemda dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Data pemantauan tindak lanjut terakhir menggunakan data tindak lanjut per 15 Desember 2021.

Untuk mencapai IKU 3 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp293.760.000,00, dan terealisasi sebesar Rp270.031.770,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp23.728.230,00 atau 8,79%.

Tabel 3.5 - Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,94%	81,13%	75,73%

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Pada Tahun 2021, realisasi IKU ini sebesar 100,27%, atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga skor IKU 4 adalah 100,27. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 3 pemeriksaan tematik nasional yaitu pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun serta pemeriksaan, serta pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ketercapaian IKU ini tidak lepas peran dari Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta tim yang melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional dalam melaksanakan pemeriksaan. Sehingga LHP atas pemeriksaan kinerja tematik nasional ini dapat terbit tepat waktu.

Untuk mencapai IKU 4 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp408.384.000,00, dan terealisasi sebesar Rp321.546.452,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp86.837.548,00 atau 27,01%.

Tabel 3.6 - Perbandingan Capaian IKU 4 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,27%	100%	100%

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pada Tahun 2021 tidak ada permintaan pemeriksaan oleh lembaga perwakilan atau IPH. Namun demikian, realisasi IKU ini tetap 100%, sama dengan target yang ditetapkan. Serta terdapat penambahan alokasi skor sebesar 0,048, sehingga skor IKU 5 adalah 100,048.

Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian IK 5 Tahun 2021 Dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,048%	100%	N/A

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada Tahun 2021, telah dilaksanakan 4 pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Asahan dan Kota Medan, serta Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Realisasi IK 6 adalah 100%, dan terdapat penambahan alokasi skor sebesar 0,69%, sehingga total skor IK 6 ini adalah 100,69 atau lebih besar dari target.

Ketercapaian IKU ini tidak lepas peran dari Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta tim yang melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik lokal dalam melaksanakan pemeriksaan. Sehingga LHP atas pemeriksaan kinerja tematik lokal ini dapat terbit tepat waktu.

Untuk mencapai IKU 6 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp700.739.000,00, dan terealisasi sebesar Rp666.279.853,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp34.459.147,00 atau 5,17%.

Tabel 3.8 - Perbandingan Capaian IK 6 Tahun 2021 Dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	N/A

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survey. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Survey dilakukan oleh *surveyor* independen.

Pada Tahun 2021, target IKU ini adalah 5.00 (memuaskan) dan terealisasi sebesar 4,50 atau lebih kecil dari target. Sehingga skor IKU 7 adalah 90. Ketidaktercapaian IKU ini mengindikasikan masih kurangnya pemahaman sebagian pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam memahami visi, misi dan nilai-nilai dasar BPK sesuai Renstra 2020-2024, sehingga masih perlunya sosialisasi baik dari pusat maupun perwakilan untuk mensosialisasikan visi, misi, dan nilai dasar sebagaimana tertuang pada renstra 2020-2024. Kegiatan *survey* dilaksanakan oleh *surveyor* independen wadana duta utama (WDU) dengan anggaran BPK Pusat. Dan responden yang dipilih adalah seluruh pegawai BPK dimana *link* nya dikirim melalui email BPK masing-masing pegawai.

**Tabel 3.9 – Perbandingan Capaian IKU 7 Tahun 2021
Dengan Capaian Tahun 2019-2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,50	4,56	N/A

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. Pada Tahun 2021, target IKU ini adalah A (87,00), dan terealisasi A (87,67) atau lebih besar dari target. Sehingga skor IKU 8 adalah 100,77. Ketercapaian ini mengindikasikan baiknya akuntabilitas kinerja satker di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi internal BPK yaitu PRISMA-SAKIP. Karena evaluasi dilakukan oleh Itama, sehingga anggaran untuk IKU ini dibebankan pada anggaran BPK Pusat.

**Tabel 3.10 – Perbandingan Capaian IKU 8 Tahun 2021
Dengan Capaian Tahun 2019-2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (87,67)	A (88,62)	A (87,23)

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi layanan dasar, aplikasi umum, aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, portal eAudit, SiPTL dan penggunaan *Big Data Analytics*) dan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2021, target IKU ini adalah 96% dan terealisasi sebesar 98,14% atau lebih besar dari target. Sehingga skor IKU 9 adalah 102,23. Ketercapaian IKU 9 ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah memaksimalkan

pemanfaatan aplikasi internal BPK. Rincian untuk nilai IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.11 – Rincian Nilai IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan				Aplikasi Manajemen Pengetahuan (5%)
E-mail (15%)	E-drive (10%)	Portal (5%)	Sisdms (25%)	SMP (10%)	SiAP (10%)	SiPTL (10%)	Big Data Analytic (10%)	
100%	100%	100%	92,56%	100%	100%	100%	100%	100%
Total		(30% x 100%) + (25% x 92,56%) + (40% x 100%) + (5% x 100%)						98,14%

Tabel 3.12 – Perbandingan Capaian IKU 9 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tnggi	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	98,14%	98,14%	97,77%

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan merupakan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*), penerapan *best practice*, dan aktivitas manajemen pengetahuan.

Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh unit/satuan kerja selain pengusul BP. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengusulkan *best practice* dengan judul “Pemanfaatan Portal Covid-19”, dan telah

dilakukan validasi dan disetujui oleh PSMK sebagai *innovative practice*. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerapkan *best practice* dari Perwakilan Bangka Belitung dengan judul “Pendampingan dan Pengenalan Lingkungan Kantor Perwakilan Bagi Pegawai Baru dan/atau Pegawai Pindah”. Dalam hal aktivitas manajemen pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 4 kegiatan *knowledge transfer forum (ktf)* dengan narasumber dan peserta dari pegawai pemeriksa perwakilan serta 3 kegiatan mentoring pemeriksaan LKPD oleh KAP untuk dan atas nama BPK.

Atas hasil tersebut, maka nilai untuk IKU 10 adalah 118,75% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.13 - Rincian Perolehan Nilai IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

No	Uraian	Nilai	Bobot	Total
1	Usulan <i>Best Practice</i>	100%	50%	50%
2	Replikasi <i>Best Practice</i>	100%	25%	25%
3	Manajemen Pengetahuan	175%	25%	43,75%
Jumlah				118,75%

Adapun target IKU ini adalah 100%, sehingga skor IKU 10 ini adalah 105. Ketercapaian IKU ini tidak lepas dari peran seluruh pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan penerapan manajemen pengetahuan.

Tabel 3.14 - Perbandingan Capaian IKU 10 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	118,75%	50%	N/A

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. IKU ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para *stakeholder* di lingkungan perwakilan. Penilaian ini dilakukan oleh *surveyor* independen Wahana Duta Utama dengan responden beberapa *stakeholder* BPK di Sumatera Utara.

Pada Tahun 2021, target IKU ini sebesar 3,8 (memuaskan) dan terealisasi sebesar 3,95 (memuaskan) atau melebihi target. Sehingga skor IKU ini adalah 103,95. Ketercapaian IKU ini mengindikasikan sudah semakin baiknya kualitas komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan para pemangku kepentingan terkait.

Tabel 3.15 – Perbandingan Capaian IKU 11 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,95	3,54	N/A

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas. IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pada Tahun 2021,realisasi IKU ini tercapai sesuai target, dimana seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah tercapai jam diklatnya. Sehingga skor IKU 12 adalah 100.

Untuk mencapai IKU 10 dan 12, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp538.136.000,00, dan terealisasi

sebesar Rp534.267.605,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp3.868.395,00 atau 0,72%.

Tabel 3.16 – Perbandingan Capaian IKU 12 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK termasuk Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada Tahun 2021 realisasi IKU ini tercapai dengan realisasi 91,04% dari target 87,50%. Sehingga skor IKU 13 adalah 104,05.

Tabel 3.17 – Perbandingan Capaian IKU 13 Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2019-2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	87,50%	91,04%	93,56%	73,68%

Komponen IKU 13 terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan nilai 86,93%, dan
2. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan nilai 97,21%.

Adapun rincian nilai EKA di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.18 - Rincian Nilai Komponen EKA
di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021**

Komponen Nilai Kinerja	Nilai
Penyerapan Anggaran	97,85%
Konsistensi	99,44%
Pencapaian Keluaran	100,00%
Efisiensi	55,39%

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp39.707.120.000,00 sesuai dengan RKAKL TA 2021, lalu direvisi menjadi Rp38.726.868.000,00 dan terealisasi s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp38.143.996.877,00.

Rincian keluaran anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 disajikan sebagai berikut.

a. Laporan Hasil Pemeriksaan

Indikator Kinerja Keluaran ini adalah Ketepatan waktu penyampaian LHP. Kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Keuangan adalah dua bulan setelah laporan keuangan unaudited diserahkan oleh entitas, dan kriteria Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Kinerja dan DTT adalah berdasarkan P2. Pada Tahun 2021, seluruh laporan hasil pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara disampaikan tepat waktu. Sehingga realisasi atas IKK ini adalah 100%, atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp8.432.677.000,00, direvisi menjadi sebesar Rp7.244.244.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.066.249.296,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp177.994.704,00 atau 2,52%.

b. LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik

Indikator kinerja keluaran ini adalah Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memeriksa 330 Partai TA 2020 dan 1 partai TA 2019 pada 34 entitas di Provinsi Sumatera Utara. Seluruh LHP di

sampaikan tepat waktu, atau kurang dari 3 bulan sejak LPJ disampaikan ke BPK. Sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp614.348.000,00, direvisi menjadi sebesar Rp498.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp498.369.000,00, atau hampir 100% terealisasi.

c. LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK

Indikator kinerja keluaran ini adalah Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP Untuk dan Atas Nama BPK. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memeriksa 3 entitas pemeriksaan, yaitu Kota Binjai, Kota Sibolga, dan Kota Tebing Tinggi. Seluruh LHP di sampaikan tepat waktu, atau kurang dari 2 bulan sejak Laporan Keuangan disampaikan ke BPK. Sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp1.926.275.000,00, direvisi menjadi sebesar Rp1.683.255.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.683.252.387,00, atau 100% terealisasi.

d. Bahan Perumusan Pendapat

Indikator kinerja keluaran ini adalah Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengusulkan 3 bahan pendapat dengan judul sebagai berikut.

1. Penggunaan sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2021;
2. Teori dan Implementasi : Perlakuan Akuntansi atas Ketekoran Kas pada Pemerintah Daerah;
3. Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.

Dari ketiga usulan ini, 2 usulan yaitu poin 1 dan 3 diterima oleh EPP sebagai bahan pendapat. Sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp21.114.000,00, dan terealisasi sebesar Rp19.729.400,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp1.384.600,00 atau 7,02%.

e. Sumbangan IHPS

Indikator kinerja keluaran ini adalah Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 34 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 8 pemeriksaan Kinerja dan 6 pemeriksaan kepatuhan. Atas temuan yang termuat pada LHP tersebut, seluruhnya telah diinput kedalam aplikasi SMP. Sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp147.328.000,00, direvisi menjadi sebesar Rp36.110.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.030.900,00, atau 100% terealisasi

f. Laporan Profil Entitas

Indikator kinerja keluaran ini adalah Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah memutakhirkan profil entitas pada seluruh Pemda di Sumatera Utara. sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp 8.479.000,00, dan terealisasi sebesar Rp8.403.000,00, atau hampir 100% terealisasi.

g. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Indikator kinerja keluaran ini adalah Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 2 kali kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada seluruh Pemda di Sumatera Utara dan BUMD terkait yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2021 dan Bulan Desember 2021. Sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp293.760.000,00, dan terealisasi sebesar Rp270.031.770,00. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp23.728.230,00 atau 8,79%.

h. Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah

Indikator kinerja keluaran ini adalah Ketepatan Waktu Penginputan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 2 kali kegiatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah. Pada Semester I Tahun 2021, batas waktu penginputan laporan kedalam

aplikasi SIKAD adalah tanggal 6 Agustus 2021, dan pada Semester II Tahun 2021 adalah tanggal 4 Februari 2022. Seluruh laporan pemantauan penyelesaian kerugian daerah di Sumatera Utara telah seluruhnya diinput sebelum batas tanggal tersebut, sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp649.909.000,00, direvisi menjadi Rp 442.528.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 415.080.282,00. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp27.447.718,00 atau 6,61%.

i. LHP Interim/Pendahuluan

Indikator kinerja keluaran ini adalah Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 34 pemeriksaan interim atas LKPD di Sumatera Utara, 7 Pemeriksaan Pendahuluan kinerja, serta 1 pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan, sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp6.458.125.000,00, direvisi menjadi Rp 6.163.189.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.162.504.112,00, atau hampir 100% dari anggaran.

j. Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan

Indikator kinerja keluaran ini adalah Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyusun laporan manajemen pemeriksaan perwakilan sebanyak 12 laporan, dan seluruhnya disampaikan sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya, sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp385.834.000,00, direvisi menjadi Rp334.914.000,00 dan terealisasi sebesar Rp323.336.256,00. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp11.577.744,00 atau 3,58%.

k. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Indikator kinerja keluaran ini adalah Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyusun laporan manajemen pemeriksaan perwakilan sebanyak 12 laporan, dan seluruhnya disampaikan sebelum

tanggal 10 pada bulan berikutnya, sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp2.577.500.000,00, direvisi menjadi Rp1.973.456.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.842.641.225,00. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp130.814.775,00 atau 7,10%.

l. Layanan Sarana Internal

Indikator kinerja keluaran ini adalah Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor, Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran, sehingga realisasi IKK ini adalah 100% atau sama dengan target.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp797.780.000,00, dan terealisasi sebesar Rp795.915.350,00 atau hampir 100% dari anggaran.

m. Layanan Prasarana Internal

Pada awal Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan layanan prasarana internal. Namun pada Bulan Juli Tahun 2021 dilakukan revisi anggaran dan menghapus anggaran layanan prasarana internal.

n. Layanan Perkantoran

Indikator kinerja keluaran ini adalah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, serta Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Pada Tahun 2021 realisasi atas 2 kegiatan diatas hampir 100% sehingga target IKK ini tercapai.

Untuk mencapai IKK ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menganggarkan anggaran sebesar Rp17.283.242.000,00, direvisi menjadi Rp19.229.669.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.022.453.899,00, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp207.215.101,00 atau 1,09%.

D. Perbandingan Capaian IKU Tahun Berjalan Dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra

Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2024. Perbandingan Capaian IKU

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahun disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IKU
Tahun Berjalan dengan Target Kinerja 5 Tahun Renstra 2020-2024**

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target pada Renstra					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021diban ding target
		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024		
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi								
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	83,71%	83,71%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,94%	105%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,27%	100,27%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,05%	100,05%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,69%	100,69%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (5,0)	Sangat memuaskan (4,56)	90%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87)	A (88)	A (89)	AA (90,05)	A (87,67)	100,77%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,14%	103,31%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	118,75%	105%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,95)	103,95%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target pada Renstra					Realisasi Tahun 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021diban ding target
		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024		
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	84%	84,5%	85,7%	91,04%	104,05%

E. Rencana Aksi Untuk Memperbaiki Kinerja Di Masa Mendatang

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang dengan melakukan rencana aksi diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, diantaranya dengan melakukan cross check;
2. Mensosialisasikan visi, misi dan nilai dasar BPK yang baru sebagaimana tertuang pada Renstra 2020-2024 pada acara yang melibatkan seluruh pegawai;
3. Membuat usulan *best practice* pada Tahun 2022;
4. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan para *stakeholder* yang terkait dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
5. Memonitoring Kinerja Anggaran Perwakilan secara periodik.

Bab IV Penutup

LAK BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi dan misi untuk terselenggaranya *good governance*.

Berdasarkan hasil validasi Direktorat PSMK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh pencapaian skor kinerja 99,94. Nilai ini meningkat apabila dibandingkan dengan skor kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 96,96. Peningkatan pencapaian target IKU tidak lepas dari kerja keras seluruh Pegawai di BPK Perwakilan Sumatera Utara dalam meningkatkan kinerja perwakilan. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tetap akan semaksimal mungkin untuk meningkatkan capaian kinerja pada masa mendatang.